

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR SAMPUL JUDUL**LEMBAR PERSETUJUAN****LEMBAR PENGESAHAN****LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBOLAHAN****LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

KATA PENGANTAR	i
-----------------------------	----------

DAFTAR ISI	iv
-------------------------	-----------

ABSTRAK	vii
----------------------	------------

DAFTAR GAMBAR	viii
----------------------------	-------------

DAFTAR TABEL	ix
---------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah	1
---------------------------------	---

B. Rumusan Masalah	9
--------------------------	---

C. Tujuan Penelitian	9
----------------------------	---

D. Kegunaan Penelitian	9
------------------------------	---

E. Hasil Penelitian Terdahulu	10
-------------------------------------	----

F. Kerangka Pemikiran	15
-----------------------------	----

G. Metode Penelitian	22
----------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM,**KEWENANGAN, DEMOKRASI, KEADILAN PEMILU,**

DAN ETIKA	28
------------------------	-----------

A. Teori Negara Hukum	28
-----------------------------	----

1. Pengertian Negara Hukum	28
----------------------------------	----

2. Elemen-elemen Negara Hukum	32
-------------------------------------	----

3. Landasan Konstitusional Negara Hukum	37
---	----

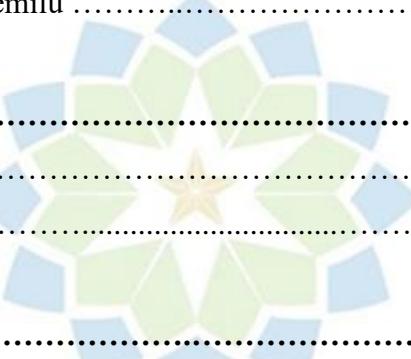
B. Teori Keadilan Pemilu	41
1. Konsep Keadilan Pemilu	41
2. Sistem Keadilan Pemilu	42
3. Kriteria Keadilan Pemilu	44
C. Teori Putusan	45
1. Pengertian Putusan	45
2. Pengertian Putusan Final dan Mengikat (<i>Final and Binding</i>)	46
3. Tipologi Putusan Kode Etik dan Akibatnya	47

BAB III DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN ETIK 51

A. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia	51
1. Demokrasi di Indonesia	51
2. Pemilu di Indonesia	55
3. Penyelenggara Pemilu	57
B. DKPP dalam Sistem Penyelenggaraan Pemilu	65
1. Sejarah Terbentuknya DKPP	65
2. Keanggotaan DKPP	76
3. Kedudukan DKPP	77
4. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban DKPP	80
C. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	83
1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	83
2. Subjek dan Objek Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	86
3. Amar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu .	88

BAB IV ANALISIS TENTANG SIFAT FINAL DAN MENGIKAT (<i>FINAL AND BINDING</i>) PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KEADILAN PEMILU	89
A. Sifat Final dan Mengikat (<i>Final and Binding</i>) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dihubungkan dengan Teori Keadilan Pemilu	89
B. Implementasi Sifat Final dan Mengikat (<i>Final and Binding</i>) Pasca Dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	120
 BAB V PENUTUP	 133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
 DAFTAR PUSTAKA	 x
LAMPIRAN	xvii
RIWAYAT HIDUP	xviii



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG